

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian RENJA OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan RENJA OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Purbalingga memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Industri, dan Perdagangan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026 yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga;
- b. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga;
- c. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan:

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 2 urusan pilihan yaitu urusan pilihan bidang perindustrian dan urusan pilihan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan dua urusan tersebut pelaksanaannya di tahun 2020 dibagi menjadi 6 program dan 27 kegiatan. Secara keseluruhan capaian fisik program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga mencapai 100% yaitu sebesar 82,30% dengan capaian realisasi keuangan sebesar 80,04 %.

Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas IKM
2. Meningkatnya Kualitas Sarpras Perdagangan
3. Meningkatnya nilai ekspor

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA OPD
Dan Pencapaian Renstra OPD s.d Tahun 2020
Kabupaten Purbalingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.06.3.06.01.01.01	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah									
3.06.3.06.01.01.01.01	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan untuk belanja operasional kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
3.06.3.06.01.01.01.02	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya kebutuhan akan belanja perjalanan dinas	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
3.06.3.06.01.01.01.03	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya sarana prasarana penunjang kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.06.3.06.01.01.01.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana penunjang operasional kantor	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
3.06.3.06.01.01.01.07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Meningkatnya SDM PNS	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
3.06.3.06.01.01.01.08	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban kegiatan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	100
3.06.3.06.01.01.15	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan									
3.06.3.06.01.01.15.01	Pengawasan Distribusi Barang	Terwujudnya ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau serta distribusi barang bersubsidi yang tepat; meliputi tepat sasaran, tepat harga,	1234 sub penyalur, 7 penyalur, 144 pengecer, 7 distributor, 11 SPBU, 2 SPBE	1234 sub penyalur, 7 penyalur, 144 pengecer, 7 distributor, 11 SPBU, 2 SPBE	1234 sub penyalur, 7 penyalur, 144 pengecer, 7 distributor, 11 SPBU, 2 SPBE	1234 sub penyalur, 7 penyalur, 144 pengecer, 7 distributor, 11 SPBU, 2 SPBE	100	1234 sub penyalur, 7 penyalur, 144 pengecer, 7 distributor, 11 SPBU, 2 SPBE	1234 sub penyalur, 7 penyalur, 144 pengecer, 7 distributor, 11 SPBU, 2 SPBE	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.06.3.06.01.01.15.02	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok	tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah serta tepat tempat Terkendalinya harga barang kebutuhan masyarakat	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	100	6 lokasi	6 lokasi	100
3.06.3.06.01.01.16	Program Standarisasi, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									
3.06.3.06.01.01.16.02	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPT Metrologi	Operasional UPTD Metrologi	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
3.06.3.06.01.01.17	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana & Prasarana Perdagangan									
3.06.3.06.01.01.17.01	Manajemen dan Pengelolaan Pasar	Jumlah pasar bemanajemen baik dan terkelola baik	5 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	100	1 pasar	1 pasar	100
3.06.3.06.01.01.17.02	Pembangunan Kawasan PKL	Terbangunnya kawasan PKL	3 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.06.3.06.01.01.17.03	Penataan dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima	GOR Guntur Darjono Lanjutan Jumlah Pedagang Kaki Lima yang ditata	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100	1 lokasi	1 lokasi	100
3.06.3.06.01.01.17.04	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah I	Tersedianya operasional untuk pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Wilayah I	8 pasar	8 pasar	8 pasar	8 pasar	100	8 pasar	8 pasar	100
3.06.3.06.01.01.17.05	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah II	Tersedianya operasional untuk pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Wilayah II	7 pasar	7 pasar	7 pasar	7 pasar	100	7 pasar	7 pasar	100
3.06.3.06.01.01.17.06	Pengelolaan dan Pemeliharaan UPTD Pasar Wilayah III	Tersedianya operasional untuk pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Wilayah II	6 pasar	6 pasar	6 pasar	6 pasar	100	6 pasar	6 pasar	100
3.06.3.06.01.01.17.08	Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan sarana prasarana pasar	Jumlah Pasar yang di bangun/ revitalisasi	5 pasar	3 pasar	1 pasar	1 pasar	100	1 pasar	1 pasar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.06.3.06.01.01.17.09	Revitalisasi Pasar Rakyat Panican (Bangub)	Revitalisasi Pasar Panican	1 pkt	0	1 pkt	0 pkt	0	1 pkt	1 pkt	100
3.06.3.06.01.01.18	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor									
3.06.3.06.01.01.18.01	Pelatihan Manajemen dan Prosedur Ekspor	Pelatihan prosedur ekspor bagi pelaku usaha	150 org	120 org	30 org	30 org	100	30 org	30 org	100
3.07.3.06.01.01.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri									
3.07.3.06.01.01.15.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sentra Industri IKM /UPT Logam	Tersedianya operasional untuk pengelolaan dan pemeliharaan UPT Logam	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
3.07.3.06.01.01.15.02	Pemenuhan sarana dan prasarana Industri Agro	Jumlah IKM Agro yang dibantu sarana dan prasarananya	150 IKM	90 IKM	30 IKM	30 IKM	100	30 IKM	30 IKM	100
3.07.3.06.01.01.15.03	Pemenuhan sarana dan prasarana Industri non Agro	Jumlah IKM NonAgro yang dibantu sarana dan	150 IKM	90 IKM	30 IKM	30 IKM	100	30 IKM	30 IKM	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		prasarananya								
3.07.3.06.01.01.15.04	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok (DBH-CHT)	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
3.07.3.06.01.01.15.05	Pembangunan Sentra Industri IKM (DAK)	Pembangunan sentra IKM Tempurung	2 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100
3.07.3.06.01.01.15.06	Peningkatan Daya Saing produk Industri Agro	Jumlah IKM Agro yang dibantu promosi dan standarisasi Produk	75 IKM	45 IKM	15 IKM	15 IKM	100	15 IKM	15 IKM	100
3.07.3.06.01.01.15.07	Peningkatan Daya Saing produk Industri non Agro	Jumlah IKM Non Agro yang dibantu promosi dan standarisasi produk	75 IKM	45 IKM	15 IKM	15 IKM	100	15 IKM	15 IKM	100
3.07.3.06.01.01.15.08	Peningkatan SDM Industri Agro	Jumlah pelaku Industri Agro yang terlatih	250 IKM	150 IKM	50 IKM	50 IKM	100	50 IKM	50 IKM	100
3.07.3.06.01.01.15.09	Peningkatan SDM Industri non Agro	Jumlah pelaku Industri Non Agro yang terlatih	250 IKM	150 IKM	50 IKM	50 IKM	100	50 IKM	50 IKM	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Dinperindag
Kabupaten Purbalingga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET
Meningkatnya Daya Saing Industri dan Pelayanan Perdagangan		PDRB Sub Sektor Industri	Prosen	27,57	27,59	Tercapai
	Meningkatnya Kualitas IKM	IKM Bersertifikat (%)	Angka	120	124	Tercapai
		IKM Berorientasi Ekspor	Angka	100	100	Tercapai
		PDRB Subsektor Perdagangan	Prosen	12,66	12,36	Turun
	Meningkatnya Kualitas Sarpras Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat Bersih dan Sehat	Pasar	4	5	Tercapai
	Meningkatnya nilai ekspor	Nilai ekspor	Rp.	3.277.902.631.500	1.804.453.353.800,27	Turun

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD dan Catatan Strategis

Berikut ini isu-isu penting dari penyelenggaraan tugas fungsi OPD

- a. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN
- b. Program Pengentasan Kemiskinan
- c. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok
- d. Biaya Produksi KUKM mengalami kenaikan yang berakibat pada turut naiknya harga produk KUKM Kabupaten Purbalingga
- e. Daya Beli Masyarakat yang menurun berimbas pada keuntungan yang didapat.
- f. Terbatasnya modal;
- g. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah;
- h. Kemampuan pemasaran yang terbatas;
- i. Akses informasi usaha rendah;
- j. Belum terjalin dengan baik kemitraan saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKMK, Usaha Besar dan BUMN);
- k. Kelembagaan yang belum tertata;

2.3.1. Rekomendasi Catatan Strategis.

1. Pertumbuhan KUKM memberi andil dalam penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan.
2. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok untuk mengantisipasi lonjakan harga dan kelangkaan kalau perlu dilakukan Operasi Pasar.
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan peralihan peralatan bagi UKM yang masih menggunakan alat ber Bahan Bakar Minyak diganti dengan peralatan menggunakan daya listrik

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Berikut ini beberapa hal penting dari rancangan awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja dinas Dinperindag Kabupaten Purbalingga menjalankan misi ke 5 **“Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja”**

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Purbalingga

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				22.972.618.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				22.972.618.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100% 100% 82 Angka 100%	7.848.495.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100% 100% 82 Angka 100%	7.848.495.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	100%	15.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Perangkat Daerah		penganggaran OPD			Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	10.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinperindag	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	2 doc	10.600.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	7 doc	4.400.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinperindag	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	7 doc	4.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.027.499.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	7.027.499.000	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	6.635.189.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperindag	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	67 ASN	6.635.189.000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam); Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 OK; 80 OK	102.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinperindag	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam); Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	30 OK; 80 OK	102.000.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan	Dinperindag	Tersedianya Honor Pengelola	12 bln	286.810.000	Pelaksanaan Penatausahaan	Dinperindag	Tersedianya Honor Pengelola	12 bln	286.810.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Keuangan, Periksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Keuangan, Periksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinperindag	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 bln	3.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinperindag	Tersusunnya LRA/LK/SPM	12 bln	3.500.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	209.582.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	209.582.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	5.309.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinperindag	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bln	5.309.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinperindag	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	2.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinperindag	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	2.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	132.587.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinperindag	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	132.587.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinperindag	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	lbr	21.190.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinperindag	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	lbr	21.190.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinperindag	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	12 bln	1.920.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
7	Penyediaan Bahan/Material	Dinperindag	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	27.326.000	Penyediaan Bahan/Material	Dinperindag	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	27.326.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperindag	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	24 kl	19.250.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperindag	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	24 kl	19.250.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	29.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82 angka	29.000.000	
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Tersedianya sarpras kantor AC, PC, printer	3 jenis	29.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Tersedianya sarpras kantor AC, PC, printer	3 jenis	29.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	179.300.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	179.300.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperindag	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bln	3.500.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	77.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinperindag	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bln	77.400.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	98.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinperindag	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	12 bln	98.400.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		388.114.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinperindag	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		388.114.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinperindag	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bln	115.664.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinperindag	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	12 bln	115.664.000	
5	Pemeliharaan Mebel	Dinperindag	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	71 jenis unit/buah	53.000.000	Pemeliharaan Mebel	Dinperindag	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	71 jenis unit/buah	53.000.000	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	19.450.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bln	19.450.000	
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	12 bln	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinperindag	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	12 bln	200.000.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	70.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	70.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	40.000.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	40.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan					
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	40.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	12 bln	40.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	30.000.000	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	80 unit	30.000.000	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	30.000.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Purbalingga	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	12 bln	30.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	13.977.337.500	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	13.977.337.500	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	13.827.337.500	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	13.827.337.500	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	11.037.337.500	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	2 pkt	11.037.337.500	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	2.790.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	21 pasar	2.790.000.000	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	150.000.000	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kab. Purbalingga	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	10 unit	150.000.000	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Fasilitasi PKL PFC dan CKC	2 pkt	150.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Purbalingga	Fasilitasi PKL PFC dan CKC	2 pkt	150.000.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	658.750.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100%	658.750.000	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	100%	546.500.000	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	100%	546.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
	di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln	46.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	12 bln	46.500.000	
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Pasar Murah	5 lokasi	500.000.000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Purbalingga	Pasar Murah	5 lokasi	500.000.000	
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100% 100%	65.000.000 65.000.000	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	100% 100%	65.000.000 65.000.000	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang penting dan strategis	100%	47.250.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	persentase pemantauan kebutuhan barang penting dan strategis	100%	47.250.000	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kali	47.250.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Purbalingga	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	12 kali	47.250.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	90 org	146.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	90 org	146.000.000	
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	90 org	146.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	90 org	146.000.000	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan ekspor	40 org	46.000.000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan ekspor	40 org	46.000.000	
2	Pameran Dagang Nasional	Kab. Purbalingga	Keikutsertaan pada pameran nasional	1 kali	100.000.000	Pameran Dagang Nasional	Kab. Purbalingga	Keikutsertaan pada pameran nasional	1 kali	100.000.000	
	PROGRAM		persentase pasar	15%	272.035.500	PROGRAM		persentase pasar	15%	272.035.500	

No.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kab. Purbalingga	tertib ukur			STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		tertib ukur			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Purbalingga	persentase pasar tertib ukur	15%	272.035.500	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Purbalingga	persentase pasar tertib ukur	15%	272.035.500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				26.239.435.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				26.239.435.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Terselenggarannya tera dan teraulang UTTP	12 bln	272.035.500	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	Terselenggarannya tera dan teraulang UTTP	12 bln	272.035.500	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				26.122.435.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				26.122.435.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	26.122.435.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	26.122.435.000	
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	26.122.435.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	kawasan/klaster industri yang terbangun	4 unit	26.122.435.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Kab. Purbalingga	Tersusunnya Raperda RPIK	1 doc	50.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Kab. Purbalingga	Tersusunnya Raperda RPIK	1 doc	50.000.000	
4			Operasional UPTD Logam 12 bulan Pengembangan	12 bln	25.622.435.			Operasional UPTD Logam 12 bulan Pengembangan	12 bln	25.622.435.00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	sarpras UPTD logam (DAK)		000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Purbalingga	sarpras UPTD logam (DAK)		0	
			bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal;	640 paket; 50 unit; 10 unit;	450.000.000			bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal;	640 paket; 50 unit; 10 unit;	450.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	100%	40.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	100%	40.000.000	
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	100%	40.000.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	100%	40.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Kab. Purbalingga	Terlaksananya pengawasan IUI	12 kl	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Kab. Purbalingga	Terlaksananya pengawasan IUI	12 kl	40.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	
1	Kabupaten/ Kota PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	80%	77.000.000	Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	80%	77.000.000	
			cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	80%	77.000.000	cakupan industri yang terdata dalam SIINAS		80%	77.000.000		
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Purbalingga	Tersusunnya database industri	1 doc	77.000.000	Kabupaten/ Kota	Kab. Purbalingga	Tersusunnya database industri	1 doc	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perindustrian

a. Arah Pembangunan Industri

Arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, Perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035. RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu :

1. Pembangunan 13 kawasan industri di luar Jawa melalui fasilitasi pemerintah dan swasta;
2. Redesain road map industrialisasi sejalan dengan trisaksti dan Nawa Cita melalui penetapan Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional;
3. Hilirisasi hasil tambang ke produk jasa industri;
4. Hilirisasi produk produk pertanian menjadi produk agro industri;
5. Expo dan pemberian penghargaan terhadap inovasi produk produk industri;
6. Kampanye sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan apresiasi terhadap kegiatan industri dalam negeri;
7. Peningkatan pendidikan dan *skill* tenaga kerja industri;
8. Fasilitasi terhadap industri dalam negeri;
9. Penurunan rezim impor;

10. Penguatan struktur industri melalui keterkaitan antara industri hulu, industri *intermediate* dan industri hilir;

3.1.2. Arah Kebijakan Nasional Di Bidang Perdagangan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk melaksanakan program pengembangan perdagangan dalam negeri, antara lain pengembangan perdagangan daerah, memperlancar distribusi bahan pokok, memperbaiki sarana dan prasarana distribusi perdagangan (pembangunan/revitalisasi pasar rakyat/pasar tradisional), serta program perlindungan konsumen, antara lain pemberdayaan dan perlindungan konsumen, serta peningkatan pengawasan barang beredar. Arah Kebijakan Nasional dibidang perdagangan antara lain

1. Mengamankan pangsa ekspor di pasar utama;
2. Memperluas Pangsa Pasar Ekspor di Pasar Prospektif dan Hub Perdagangan Internasional;
3. Meningkatkan Diversifikasi Produk Ekspor;
4. Mengamankan Pasar Domestik Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Nasional;
5. Meningkatkan Kontribusi Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM);
6. Meningkatkan Perlindungan konsumen;
7. Meningkatkan Efisiensi Sistem Distribusi & Logistik;
8. Meningkatkan Fasilitasi dan Iklim Usaha Perdagangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

3.2.1. Tujuan

1. Meningkatkan daya saing pada era globalisasi dengan meningkatkan produksi;
2. nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, pemberdayaan;
3. peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. peningkatan pertumbuhan investasi daerah yang terarah melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta peningkatan nilai investasi dan investor;

5. Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik;
6. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan;
7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Peningkatan produksi, dan nilai tambah melalui pemberdayaan, meningkatkan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi KUKM serta pertumbuhan investasi daerah;
3. Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik;
4. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
5. Meningkatkan kinerja dan pelayanan.

3.3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD; Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		100% 100% 82 Angka 100%	7.899.250.000			100% 100% 82 Angka 100%	7.899.250.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran OPD		100%	7.899.250.000			100%	7.899.250.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	Dinperindag	2 doc	15.000.000			2 doc	15.000.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan lembar kerja database SIPD) yang tersusun	Dinperindag	7 doc	10.600.000			7 doc	10.600.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	7.042.310.000			100%	7.042.310.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	Dinperindag	67 ASN	6.650.000.000			67 ASN	6.650.000.000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam); Tersedianya perjalanan dinas luar daerah	Dinperindag	30 OK; 80 OK	102.000.000			30 OK; 80 OK	102.000.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Penguasaan, Honor Operator Komputer	Dinperindag	12 bln	286.810.000			12 bln	286.810.000
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	Tersusunnya LRA/LK/SPM	Dinperindag	12 bln	3.500.000			12 bln	3.500.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Anggaran								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag	100%	219.440.000			100%	219.440.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	Dinperindag	12 bln	6.000.000			12 bln	6.000.000
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Dinperindag	12 bln	3.000.000			12 bln	3.000.000
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Dinperindag	12 bln	140.000.000			12 bln	140.000.000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	Dinperindag	lbr	21.190.000			lbr	21.190.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	Dinperindag	12 bln	2.000.000			12 bln	2.000.000
7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinperindag	12 bln	28.000.000			12 bln	28.000.000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	Dinperindag	24 kl	19.250.000			24 kl	19.250.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinperindag	82 angka	100.000.000			82 angka	100.000.000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya sarpras kantor AC, PC, printer	Dinperindag	3 jenis	100.000.000			3 jenis	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang	Dinperindag	100%	182.500.000			100%	182.500.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	ditindaklanjuti Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	Dinperindag	12 bln	3.500.000			12 bln	3.500.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	Dinperindag	12 bln	80.000.000			12 bln	80.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	Dinperindag	12 bln	99.000.000			12 bln	99.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Dinperindag		340.000.000				340.000.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll); Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	Dinperindag	12 bln	120.000.000			12 bln	120.000.000
5	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Mebelaur baru (Kursi, Meja, Korden, dll)	Dinperindag	71 jenis unit/buah	50.000.000			71 jenis unit/buah	50.000.000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	Dinperindag	12 bln	20.000.000			12 bln	20.000.000
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan, dll)	Dinperindag	12 bln	150.000.000			12 bln	150.000.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	jumlah usaha perdagangan yang		80 unit	70.000.000			80 unit	70.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PERUSAHAAN	terfasilitasi perijinan							
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	Kab. Purbalingga	80 unit	40.000.000			80 unit 40.000.000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen secara tepat waktu	Kab. Purbalingga	12 bln	40.000.000			12 bln 40.000.000	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	jumlah usaha perdagangan yang terfasilitasi perijinan	Kab. Purbalingga	80 unit	30.000.000			80 unit 30.000.000	
1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terfasilitasinya penerbitan TDG; terdatanya jumlah gudang	Kab. Purbalingga	12 bln	30.000.000			12 bln 30.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	Kab. Purbalingga	10 unit	23.150.000.000			10 unit 23.150.000.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	Kab. Purbalingga	10 unit	23.000.000.000			10 unit 23.000.000.000	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyempurnaan PFC dan pengadaan sarpras pasar	Kab. Purbalingga	2 pkt	20.000.000.000			2 pkt 20.000.000.000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	penyelenggaraan pelayanan UPTD Pasar dan pembinaan pasar kabupaten	Kab. Purbalingga	21 pasar	3.000.000.000			21 pasar 3.000.000.000	

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah pasar kabupaten yang memenuhi standar	Kab. Purbalingga	10 unit	150.000.000			10 unit	150.000.000
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi PKL PFC dan CKC	Kab. Purbalingga	2 pkt	150.000.000			2 pkt	150.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	Kab. Purbalingga	100%	865.000.000			100%	865.000.000
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis;	Kab. Purbalingga	100%	750.000.000			100%	750.000.000
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Fasilitasi dan koordinasi keterediann Bahan pokok dan Gas Elpiji	Kab. Purbalingga	12 bln	50.000.000			12 bln	50.000.000
3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Pasar Murah	Kab. Purbalingga	5 lokasi	700.000.000			5 lokasi	700.000.000
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	Kab. Purbalingga	100%	65.000.000			100%	65.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	Kab. Purbalingga	100%	65.000.000			100%	65.000.000
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemantauan kebutuhan barang kebutuhan penting dan strategis	Kab. Purbalingga	100%	50.000.000			100%	50.000.000
2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pupuk bersubsidi sesuai RDKK	Kab. Purbalingga	12 kali	50.000.000			12 kali	50.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor		90 org	150.000.000			90 org	150.000.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah calon eksportir yang telah difasilitasi/dilatih perdagangan ekspor	Kab. Purbalingga	90 org	150.000.000			90 org	150.000.000
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan dan pelatihan ekspor	Kab. Purbalingga	40 org	50.000.000			40 org	50.000.000
2	Pameran Dagang Nasional	Keikutsertaan pada pameran nasional	Kab. Purbalingga	1 kali	100.000.000			1 kali	100.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase pasar tertib ukur		15%	5.300.000.000			15%	5.300.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	persentase pasar tertib ukur	Kab. Purbalingga	15%	<i>5.300.000.000</i>			15%	<i>5.300.000.000</i>
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terselenggaranya tera dan teraulang UTTP	Kab. Purbalingga	12 bln	5.300.000.000			12 bln	5.300.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	kawasan/klaster industri yang terbangun		4 unit	25.700.000.000			4 unit	25.700.000.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	kawasan/klaster industri yang terbangun	Kab. Purbalingga	4 unit	25.550.000.000			4 unit	25.550.000.000
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Raperda RPIK	Kab. Purbalingga	1 doc	50.000.000			1 doc	50.000.000
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Operasional UPTD Logam 12 bulan Pengembangan sarpras UPTD logam (DAK)	Kab. Purbalingga	12 bln	25.000.000.000			12 bln	25.000.000.000
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	bantuan sarpras IKM agro dan non agro; sertifikasi batik; sertifikasi halal;	Kab. Purbalingga	640 paket; 50 unit; 10 unit;	500.000.000			640 paket; 50 unit; 10 unit;	500.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi		100%	50.000.000			100%	50.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha	cakupan ijin usaha industri yang terfasilitasi	Kab. Purbalingga	100%	50.000.000			100%	50.000.000

Kode	Usulan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2	Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan IUI	Kab. Purbalingga	12 kl	50.000.000			12 kl	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	cakupan industri yang terdata dalam SIINAS		80%	100.000.000			80%	100.000.000
		cakupan industri yang terdata dalam SIINAS	Kab. Purbalingga	80%	100.000.000			80%	100.000.000
1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersusunnya database industri	Kab. Purbalingga	1 doc	100.000.000			1 doc	100.000.000

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.